



**KLIPING  
BERITA  
HUKUM  
JANUARI  
2024**

SUMBER : [berita.hukum.id](http://berita.hukum.id)

TANGGAL : 15 Januari 2024



Tanjungpinang – Laman Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Kepulauan Riau, Minggu (14/01/2024) merilis informasi imbauan waspada penipuan dimana pelakunya mencatut nama Kapolres Natuna. Dari laman tersebut nama Kapolres Natuna AKBP Nanang Budi Santosa, S.I.K dan Kasat Reskrim AKP Apridony.,SH.,MH dicatut orang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan. Modusnya, pelaku meminta sejumlah uang kepada pengusaha dan masyarakat. Kali ini, Bendahara (Persatuan Wartawan Indonesia) PWI Kepri Adi Indra Pawenari nyaris menjadi korban penipuan.

Adi mengaku tiba-tiba ditelepon oleh orang yang mengaku sebagai Kapolres Natuna. Sang penipu meminta bantuan uang untuk akomodasi istrinya di Jakarta. Sebelumnya, Adi mendapat kiriman pesan WhatsApp dari pengurus PWI Natuna dengan nama Ramayulis Piliang. Isi pesan WA tersebut adalah Kasat Reskrim Polres Natuna akan menghubungi Adi. Tak lama berselang, Adi mendapat pesan singkat di telepon selulernya oleh seorang yang mengaku Kasat Reskrim Polres Natuna, IPTU Apridony dan meminta Adi menghubungi Kapolres Natuna.

SUMBER : rri.co.id

TANGGAL : 15 Januari 2024



KBRN, Jakarta : KPU RI menetapkan, jadwal kampanye kbar capre-cawapres pemilu 2024 dilakukan mulai 21 Januari 2024. Kampanye akbar itu berakhir pada 10 Februari 2024.

“Kampanye kan sudah ada ketentuan. Ketentuannya di Peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye,” Kata Komisioner KPU August Mellaz, Minggu (14/1/2024).

Mellaz menambahkan, PKPU tersebut mengatur ‘rambu-rambu’ yang boleh dan tida dilakukan saat kampanye. Selama proses kampanye akbar, tiap capres-cawapres akan dikawal ketat oleh kepolisian.

“Tentu, kami undang juga salah satunya adalah pihak kepolisian. Karena nanti terkait dengan koordinasi dengan aparat keamanan segala macam di sana,” ucap Mellaz.

Ia mengharapkan, skema tiga zonasi kampanye akbar pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan efektif. Meski demikian, katanya. Tolak ukur efektif atau tidaknya tidak bisa dinilai oleh KPU.

“efektif atau tidak, sebenarnya yang mengukur kan bukan KPU-nya, tapi tim paslon masing-masing. Kalau tim paslon menyatakan skemanya per satu hari, ya bebannya kan di mereka, mereka kan bisa mengukur”, ujar Mellaz.

SUMBER : CNBC Indonesia

TANGGAL : 15 Januari 2024



**Jakarta, CNBC Indonesia** - Debat calon wakil presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 akan digelar pada Minggu, 21 Januari 2024. Berikut adalah hasil survei 10 lembaga terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dirangkum CNBC Indonesia sejak awal Januari 2024.

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menempati posisi teratas dengan raihan suara 48,05%. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyusul dengan 21,80% dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 18,35%.

Hal itu berdasarkan hasil survei elektabilitas capres-cawapres terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs. Survei tersebut digelar pada periode 27 Desember 2023-5 Januari 2024.

Pengamat politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam membandingkan survei capres-cawapres periode ini dengan survei sebelumnya pada November 2023. Ia menilai tren elektabilitas Prabowo-Gibran mengalami kenaikan, Anies-Cak Imin cenderung stagnan, dan Ganjar-Mahfud menurun.

"Dibandingkan data survei akhir bulan November, Prabowo-Gibran kembali mengalami kenaikan dari 42,66% ke 48,05%, sementara Anies-Muhaimin cenderung stagnan dari 22,13 ke 21,80%, dan Ganjar-Mahfud dari 22,95 turun 18,35%, sementara yang belum menentukan pilihan menurun tipis dari 12,26 turun ke 11,80%," kata Arif dalam keterangannya seperti dikutip detikNews, Rabu (10/1/2024).

Survei Ipsos Public Affairs terbaru ini menyasar sebanyak 2.000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Ipsos Ifield yang merupakan sistem Computer-Assisted Personal Interviews (CAPI).

Adapun, sampel diambil dengan teknik multi stage random sampling. Survei ini memiliki margin of error +/- 2,19% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Arif menilai efek Joko Widodo (Jokowi) semakin nyata bagi tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran. Menurutnya, capres nomor urut 02 itu juga mendapat dukungan dari pemilih Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Arif mengungkapkan soliditas dukungan pasangan calon presiden paling tinggi juga ada pada paslon Prabowo-Gibran. Ia menyebut hanya sebesar 13 persen yang masih bisa berubah. Sementara, sebanyak 15 persen pendukung AMIN masih berpotensi bergeser. Lalu, jumlah pendukung paslon Ganjar-Mahfud yang kemungkinan berubah pilihan sekitar 20 persen.

SUMBER : [beritahukum.id](http://beritahukum.id)

TANGGAL : 12 Januari 2024



JAKARTA – Pemilu 2024 akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Bagi Anda mahasiswa atau pekerja yang berada di luar kota tidak perlu khawatir, karena masih dapat menggunakan hak pilih meskipun tidak sesuai dengan TPS yang telah ditetapkan. Masyarakat yang berada di luar kota misalnya mahasiswa ataupun pekerja dapat menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu 2024. Caranya dengan mengajukan pindah TPS atau pindah memilih.

Menurut sumber resmi laman [kpu.go.id](http://kpu.go.id), pemilih di luar kota dapat mengajukan pindah TPS atau pindah memilih dengan syarat sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di alamat KTP. Pindah memilih atau pindah TPS dilakukan apabila pemilih sedang berada di tempat yang tidak sesuai dengan alamat e-KTP.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Nantinya, pemilih akan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak suaranya untuk mengikuti Pemilu 2024 di TPS sesuai domisili. Hal ini apabila telah melakukan permohonan pindah memilih atau pindah TPS Pemilu 2024 dan sudah berhasil terdaftar sebagai DPTb sesuai domisili.

### **Cara Ikut Pemilu 2024 di Luar Kota**

Mahasiswa dan pekerja yang berada di luar kota dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS agar dapat mengikuti Pemilu di wilayah tempatnya berada.

### **Berikut ini cara ikut Pemilu 2024 di luar kota.**

1. Datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Pemilih harus membawa bukti dukung alasan pindah memilih, misalnya karena tugas maka bawa surat tugas.
3. KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan (masuk di Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb)
4. Pemilih akan diberikan bukti dari KPU berupa formulir A-Surat Pindah Memilih.
5. Berikut berkas yang ditunjukkan saat melaporkan diri untuk pindah TPS.
6. Menunjukkan KTP-elektronik atau KK.
7. Melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

**SUMBER : blorakab.go.id**

**TANGGAL : 14 Januari 2024**



Meski hari libur, ratusan petugas sortir dan pelipat surat suara pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah tetap beraktivitas kejar target supaya cepat selesai, Minggu (14/1/2024).

Sebanyak 165 warga itu dberdayakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketua KPU Blora Widi Nurintan Ary Kurnianto mengatakan penyortiran dan pelipatan surat suara sudah dimulai sejak tanggal 6 Januari 2024.

“yang disortir dan dilakukan pelipatan adalah surat suara Pemilu 2024 untuk DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk sortir dan pelipatan surat suara DPR RI sebanyak 719.856 sudah selesai dilaksanakan.

“saat ini dilakukan sortir dan pelipatan surat suara DPR Provinsi sebanyak 719.856. insyaallah, dua tiga hari selesai.”  
Tambahnya.

Setelah itu, tambah Widi, dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Kabupaten Blora.

“kalau itu sudah selesai baru dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Capres dan Cawapres. Targetnya akhir bulan Januari ini sudah selesai semua,” terangnya.

Sementara itu, penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 yang dilaksnakan di gedung Mustika PKPRI Blora itu dijaga ketat oleh petugas Polisi dan Polres Blora.

Meski demikian, para petugas sortir dan pelipatan surat suara tampak riang gembira, sembari mendengarkan alunan musik.

“semangat dan senang, mari kita sukseskan Pemilu 2024,” kata salah seorang petugas yang enggan disebutkan namanya. (Tim Dinkominfo Blora).

SUMBER : beritahukum.id

TANGGAL : 14 Januari 2024



**Jember** – Polisi menangkap pemilik akun TikTok **@calonistri71600** berinisial AWK (23) di Jember, Jawa Timur pada Sabtu (13/1/2024). Pelaku diduga melontarkan ancaman kepada calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan.

Dalam pemeriksaan, AWK mengakui akun TikTok **@calonistri71600** adalah benar miliknya. Dia juga mengakui telah berkomentar tentang pengancaman kepada Anies.

“Dari pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui yang pertama itu **@calonistri** itu adalah akunnya dia, benar. Dan dia melakukan pengancaman itu dan diakui bahwa dia yang membuat cuitan itu,” ujar Irjen Shandi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Sabtu (13/1/2024).

Atas perbuatannya, AWK terancam Pasal 29 UU ITE yaitu pengancaman melalui media dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.

Sebelumnya diketahui, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mendapat ancaman ditembak saat melakukan siaran langsung melalui akun TikTok pribadinya.

SUMBER : bbc.com

TANGGAL : 15 Januari 2024



Dugaan keterlibatan puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam skandal pungutan liar di rutan KPK menunjukkan “pengeroposan nilai integritas yang sangat serius di tubuh KPK”, kata pengamat antikorupsi. KPK menegaskan bahwa proses penegakan etik dan dugaan tindak pidana masih berjalan secara independen.

Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Zaenur Rohman mengatakan pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga anti-rasuah itu sudah merambat dari pimpinan hingga ke tingkat pegawai.

Ia merujuk pada kasus yang menjerat ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.

“Ketika pimpinan tidak memberikan keteladanan bahkan menerjang nilai-nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi, tentu anak buah, pegawai, bawahan itu akan berlaku lebih beringas lagi,” kata Zaenur pada Minggu (14/01).



SUMBER : [bbc.com](http://bbc.com)  
TANGGAL : 10 Januari 2024



Iklan Kementerian Pertahanan satu halaman penuh di Harian Kompas yang menampilkan wajah dan klaim keberhasilan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan memicu kontroversi. Iklan itu terbit pada 8 Januari lalu—satu hari se usai debat calon presiden yang menyorot kinerja menteri pertahanan itu.

Petinggi Harian Kompas membuat klaim bahwa iklan itu tidak terkait pencalonan Prabowo dalam Pilpres 2024 karena "materinya berasal dari Kementerian Pertahanan". Namun pakar pemilu menilai alasan itu justru problematik karena pencitraan capres selama Pilpres tidak semestinya dibiayai anggaran negara.

Bawaslu menyatakan akan mendalami persoalan ini.

Adapun Kementerian Pertahanan dan para pihak di sekitar pencalonan Prabowo belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan BBC News Indonesia.

Kontroversi iklan Kemhan di Harian Kompas dipicu ketiadaan Peraturan KPU yang secara rinci melarang publikasi berkaitan capres atau cawapres berstatus pejabat negara, kata Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

SUMBER : bbc.com  
TANGGAL : 15 Januari 2024



Mantan pejabat Pajak, Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Rafael juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp10 miliar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Eks pejabat pajak ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

Demikian majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dalam putusannya, yang dibacakan pada Senin (08/01) siang.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suparman Nyompa, dalam amar putusannya.

SUMBER : hukumonline.com

TANGGAL : 12 Januari 2024



Kepala daerah maupun anggota dewan sejatinya penyelenggara negara yang diberikan amanah masyarakat setempat agar dapat mengelola keuangan dan sumber daya yang ada. Namun tak sedikit kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Seperti halnya kepala daerah Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga (EAR) ditengarai terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bergerak dengan segera menangkap dan menetapkan sebagai tersangka terhadap Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga. Tak saja Erik yang ditetapkan tersangka, ada pula anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) serta dua pihak swasta, yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

“Tim Penyidik melakukan penahanan untuk tersangka EAR, RAR, FS, dan ES; masing-masing untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 di Rutan KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK dikutip dari Antara, Jumat (12/1/2024).

Dia menerangkan, penangkapan dilakukan berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat orang tersangka tersebut. Bermula dari laporan dan informasi masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara. Yakni berupa pengondisian pemenang kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.